

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

**Jl. Pahlawan No 28 C Telp. (0343)424019 Fax. (0343)429707
email bakesbangpol.kopas@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan suatu laporan Kinerja yang telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari penulisan LKJIP untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Mengingat pentingnya peranan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai alat perbandingan dengan hasil realisasi tahun sebelumnya, serta sebagai acuan untuk membuat Rencana Kerja di tahun berikutnya. Selain itu, LKjIP juga membantu dalam pengevaluasian kinerja dan anggaran yang terealisasi pada tahun tersebut. Sehingga dapat terlihat apabila terdapat perbedaan antara realisasi dengan Rencana Strategi (Renstra).

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dapat memenuhi ketentuan

tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas politik yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak.

Pasuruan, 6 Maret 2023

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PASURUAN

Drs. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196409171990031013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKJIP tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari tiga yaitu 1) Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif dengan realisasi 8,75% 2) Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan dengan realisasi 72,72% 3) Persentase pemilih dalam Pemilu dengan realisasi 0 karena di tahun 2022 tidak ada Pemilu. Dapat disimpulkan dari capaian yang diperoleh bahwa tiap indikator sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Adapun perbaikan dari kinerja tahun 2022 yaitu untuk tetap mempertahankan kinerja yang sudah dicapai di tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.2.3 Isu Strategis	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022.....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja	26
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	26
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	26
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	28
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	29
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional	30

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	31
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	32
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	32
3.2 Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 202	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.....	11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022.....	14
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022.....	15
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022.....	20
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	28
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	29
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi	30
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	31
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran.....	32
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	33
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LKJIP tahun 2022 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*) merupakan salah satu tuntutan publik pada saat ini, dimana menuntut aparatur pemerintah untuk melaksanakannya dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Kinerja yang telah dicapai oleh suatu instansi Pemerintah khususnya Kepala Instansi tersebut dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hal itu merupakan tujuan dari disusunnya LKJIP yaitu untuk memberikan gambaran tingkat akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pembinaan kesatuan bangsa dan menjembatani terwujudnya stabilitas politik di wilayah Kota Pasuruan juga ikut andil dalam pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama, yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan, dimana berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Informasi yang disajikan adalah tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan, sehingga LKjIP tersebut dapat dijadikan dasar dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pada tahun yang akan datang.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

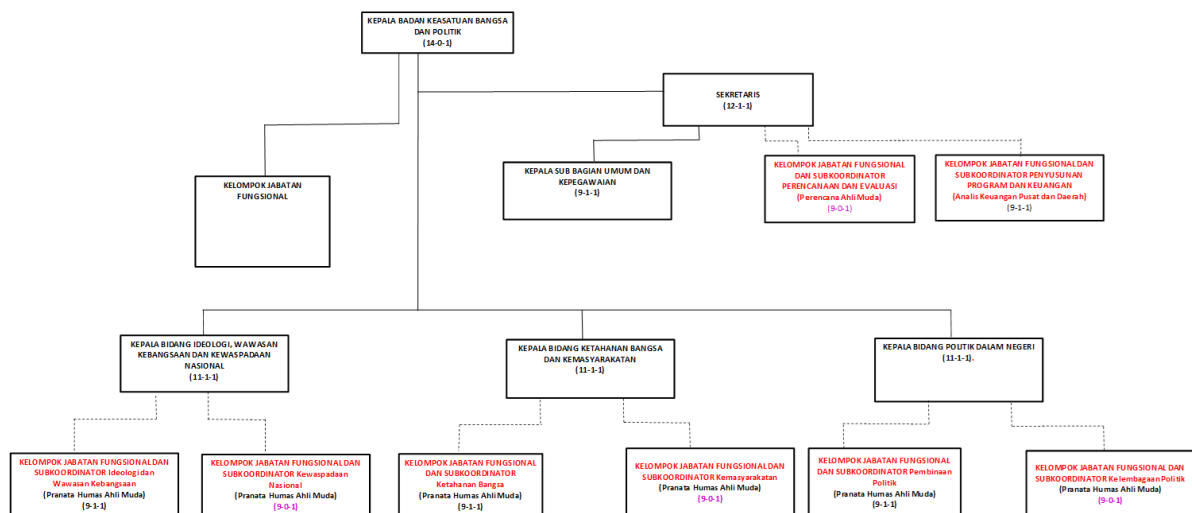
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, organisasi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik (pasal 3). Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut (pasal 4) :

- a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022

1.2.2 Anggaran

Berikut merupakan tabel perbandingan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 dan tahun 2022.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 202

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2021	Rp 9.660.386.708
APBD	Tahun 2022	Rp 9.174.080.391

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

1.2.3 Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik-Kementerian Dalam Negeri
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tinjauan hal-hal di atas, isu-isu strategis yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan dan akan dibenahi melalui Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis.
- c. Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah.

- d. Belum optimalnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban.
- e. Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kota Pasuruan.
- f. Berkembangnya isu penistaan agama (SARA).
- g. Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda.
- h. Maraknya *cyber crime* sebagai dampak globalisasi teknologi informasi.
- i. Angka kriminalitas dan unjuk rasa/demonstrasi yang masih cenderung meningkat.
- j. Ancaman radikalisme dan terorisme.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III: Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

a. Visi

Visi Walikota Pasuruan 2021 - 2026 sebagai Kepala Daerah terpilih merupakan visi Kota Pasuruan. Pembangunan Kota Pasuruan 2021 – 2026 diarahkan untuk mewujudkan kondisi akhir yaitu “Kota Pasuruan Kota Madinah”. Maju Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmonis Warganya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Walikota Pasuruan, misi yang akan dilaksanakan sebagai Misi Walikota Pasuruan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
2. Membangun Kota yang Indah dan Nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.
3. Memantapkan kehidupan Masyarakat Multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.
4. Transformasi Layanan Publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam ranah misi ke-3 yaitu, Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis dengan Modal Sosial yang Tangguh serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Merata.

c. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan

permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan yang dirumuskan untuk mencapai visi, melaksanakan visi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatnya stabilitas wilayah.

Dengan mengacu pada tujuan di atas, sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan yaitu Meningkatnya Kondusifitas Wilayah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.			Indeks Stabilitas	74,5	76,05	77,75	78,90	80,25
		1.1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	3%	3%	3%	3%
		1.2	Meningkatnya ketahanan dan	Persentase penurunan konflik di	20%	20%	20%	20%	20%

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kondusifitas Wilayah	Kota Pasuruan					
		1.3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	-	-	85%	-	-

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sum ber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.	Indeks Stabilitas		Nilai	Ketahanan adalah kemampuan dalam mengembangkan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala masalah dan ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar dan secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup. Kondusifitas wilayah adalah situasi dan kondisi wilayah yang aman dan terkendali		
2.	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	2.1	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	Persen	Ormas aktif adalah ormas yang telah terdaftar dan teregistrasi di Bakesbangpol Kota Pasuruan serta aktif mengikuti pembinaan di tahun berjalan	$= \frac{\sum \text{ormas aktif tahun } (n) - \sum \text{ormas aktif tahun } (n-1)}{\sum \text{ormas aktif thn } (n-1)} \times 100$	Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan
3	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	3.1	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persen	Konflik adalah potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh sosial politik, dan penurunan yang dimaksud adalah penurunan jumlah potensi konflik berlatar belakang sosial politik .	$= \frac{\sum \text{potensi konflik berlatar belakang sospol thn } (n1) - \sum \text{potensi konflik berlatar belakang sospol thn } n}{\text{Jumlah potensi konflik berlatar belakang sospol thn } (n-1)} \times 100$	Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasioanl

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
4	Meningkatnya Ketahanan dan kondusifitas Wilayah	4.1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Persen	Pemilih Pemilu adalah WNI yang memiliki hak pilih untuk mengikuti PEMILU	$= \frac{\text{Jumlah pengguna hak pilih PEMILU tahun terakhir}}{\text{Jumlah DPT PEMILU tahun terakhir}} \times 100$	Bidang Politik dalam Negeri

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Adapun tujuan dan sasaran berserta Indikator selaras dengan Renja PD tahun 2022 yang dituangkan pada tabbel dibawa ini :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)		
1	Terwujudnya Masyarakat yang harmoni yang berwawasan kebangsaan & nilai-nilai luhur Pancasila.			Indeks Stabilitas	Nilai	
		1.1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	Persen	3%
		1.2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persen	20%
		1.3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Persen	0

Sumber : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2022

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Program

Anggaran

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Rp 56.500.620
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp 703.687.170
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp 433.565.540
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Rp 510.023.590

Program**Anggaran**

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Rp 2.465.615.940
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas
Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 3.796.716.166
Kabupaten/Kota

Adapun anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan
DPA Perangkat Daerah yang dituangkan pada table dibawa ini :

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	10
		Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	50
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	4
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun	2
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Event Publikasi Pembangunan yang Diikuti	2
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	11
		Jumlah laporan keuangan triwulan yang disusun	11
		Jumlah Penerima Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tersedia	4
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosi realisasi anggaran yang disusun	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian yang Tersusun	12
		Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata usahaan, Pengurus barang, Penyimpan barang, PPKM, PPBJ, PJPHP dan Admin SIPD yang tercukupi	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	5
		Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi	2
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	5
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan	Jumlah Spanduk/Banner yang Tersedia	72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana	256
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	3
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	31
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	5
		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor yang tersedia	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	8
		Jumlah ijin Kendaraan Dinas kantor yang terselesaikan	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	23
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya	12
		Luas Bangunan yang di pelhara	255
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	8
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik	3
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	110
		Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	110
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU</i>	-
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik bagi pada pemilih pemula (Orang)	240
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai Politik yang mengikuti Harmonisasi	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	9
		Jumlah Tenaga PHL Sub Bidang Kelembagaan Politik	1
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang Ber SKT	2
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyaakat yang dibina</i>	40
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	35
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan	75
		Jumlah Ormas/LSM yang mendapatkan hibah	16
		Jumlah tenaga PHL Sub Bidang Kemasyarakatan	1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif</i>	85
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Jumlah peserta Fasilitasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika (Orang)	150

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (Orang)	90
		Jumlah penerima bantuan (HIBAH)	1
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	40
		Jumlah monitoring dan evaluasi	40
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Persentase Peningkatan Penanganan Konflik</i>	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan (Orang)	9883
		Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial (Orang)	250
		Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing (Orang)	100
		Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah (Orang)	100
		Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)	100
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan (Orang)	45
		Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	2
		Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	2
		Jumlah tenaga PHL Pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	1

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Program

Anggaran

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Rp 450.069.500
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp 913.280.330
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp 388.485.540
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Rp 554.073.590

Program**Anggaran**

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Rp 2.795.294.530

Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas

Penanganan Konflik Sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 4.072.876.90.

Kabupaten/Kota

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	10
		Jumlah peserta Forum Pemangku Kepentingan	50
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1
	Koordinasi dan Penyusunan Lapran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan monev yang disusun	4
		Jumlah dokumen SAKIP dan LKJIP yang disusun	2
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti	3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji & tunjangannya	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	11
		Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	11
		Jumlah Penerima Honor Penanggung Jawab Keuangan yang tersedia	4
		Jumlah Tenaga Administrasi (PHL) yang tersedia	1

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik Daerah yang tersusun tepat waktu	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang OPD dan Pengelolaan Kepegawaian yang Tersusun	12
		Jumlah Honor Pejabat Pengguna barang, Penata usahaan, Pengurus barang, Penyimpan barang, PPKM, PPBJ, PJPHP dan Admin SIPD yang tercukupi	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	22
		Jumlah Honorarium tenaga pelaksana yang tercukupi	2
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan Rohani dan Penyuluhan yang tersedia	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia menurut jenisnya	5
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan	Jumlah Spanduk/Banner yang Tersedia	72
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Yang Terlaksana	345
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	2
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pelayanan perkantoran	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik yang Terpenuhi	Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terpenuhi	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia menurut jenisnya	31
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Tersedia	5
		Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor yang tersedia	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	8
		Jumlah ijin Kendaraan Dinas kantor yang terselesaikan	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	32
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Kebersihan Kantor yang tersedia Menurut Jenisnya	12
		Luas Bangunan yang di pelihara	255
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	8
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Peningkatan Penanganan Konflik	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara	110
		Jumlah Peserta Pendidikan Wawasan Kebangsaan	350
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik	20
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	-
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Politik pada pemilih pemula	240

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Partai Politik yang mengikuti Harmonisasi	100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dibidang di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Partai politik yang menerima bantuan keuangan (HIBAH)	9
		Jumlah tenaga PHL sub Bidang Kelembagaan Politik	1
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang Ber SKT	2
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina</i>	40
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengikuti kegiatan Cangkrukan	35
		Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti pembinaan	75
		Jumlah Ormas/LSM yang mendapatkan hibah	16
		Jumlah tenaga PHL Sub bidang Kemasyarakatan	1
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Lembaga Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Aktif	20
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif</i>	85
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta fasilitasi Kerukunan Umat beragama	100
		Jumlah peserta Fasilitasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika	120
		Jumlah peserta Fasilitasi PAKEM	20
		Jumlah penerima bantuan hibah	1
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi	40

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6		Jumlah peserta rapat hasil monitoring dan evaluasi FKUB & penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	40
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Konflik yang dimediasi	75
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Persentase Peningkatan Penanganan Konflik</i>	3
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah personil pengamanan wilayah Kota Pasuruan (Orang)	12710
		Jumlah Pembinaan Penanganan Konflik sosial (Orang)	250
		Jumlah Peserta Koordinasi Pemantauan Orang asing (Orang)	100
		Jumlah peserta pembekalan analisa dan deteksi di wilayah (Orang)	100
		Jumlah Peserta Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat (Orang)	100
		Jumlah Tim Kewaspadaan Dini dan Puskomin Kota Pasuruan (Orang)	45
		Jumlah penerima bantuan keamanan (HIBAH)	2
		Jumlah tenaga PHL fasilitasi stabilitas wilayah	2
		Jumlah tenaga PHL pembinaan kewaspadaan dini masyarakat	1

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	8,75%	291,66%	Sangat Tinggi	Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan
2	Meningkatnya ketahanan dan	Persentase penurunan konflik di	20%	72,72%	363,63%	Sangat Tinggi	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kondusifitas Wilayah	Kota Pasuruan					Kewaspadaan Nasional
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0 0	0 0	-	Bidang Politik dalam Negeri

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa terdapat 3 indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Pasuruan yaitu :

a. Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif

Tahun 2022 realisasi Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif sebesar 8,75% sehingga capainnya 291,66% dengan target 3%. Dapat disimpulkan bahwa indikator persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif mencapai target bahkan melampaui target. Metode perolehan data terkait formulasi indikator sasaran diatas diperoleh dari perhitungan jumlah ormas/LSM yang melakukan kegiatan pemberdayaan yaitu yang aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dan yang menerima hibah keuangan di tahun 2022. Sehingga dari formulasi di tabel 2.2 diperoleh realisasi sebesar 8,75%.

b. Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan

Tahun 2022 realisasi indikator persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan 72,72% sehingga capaiannya 363,63% dengan target 20%. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan mencapai target bahkan melampauinya. Metode perolehan data dalam formulasi perhitungan indicator sasaran diatas diperoleh dari pelaporan kejadian konflik dari tiap kelurahan ke Bakesbangpol Kota Pasuruan serta dari survei pemantauan ke lapangan terkait kejadian berlatarbelakang sosial politik. Sehingga

berdasarkan formulasi pada tabel 2.2 diperoleh realisasi sebesar 72,72%.

c. Persentase pemilih dalam Pemilu

Untuk indikator persentase pemilih dalam pemilu tidak ada realisasi maupun target di tahun 2021 dan tahun 2022 karena tidak ada Pemilu.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	2,97%	99%	3%	8,75%	291,66%	
2	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	49%	245%	20%	72,72%	363,63%	
3	Meningkatnya ketahanan dan kondusifitas wilayah	Persentase pemilih dalam pemilu	-	-	-	-	-	-	Tahun 2021 & 2022 tidak ada Pemilu sehingga target (-)

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa realisasi persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif tahun 2021 sebesar 2,97% dengan target 3% sehingga capainnya 99%. Sedangkan tahun 2022 realisasinya 8,75% sehingga capainnya 291,66% dengan target yang sama. Dapat disimpulkan indikator persentase peningkatan orkemas yang aktif mengalami kenaikan di tahun 2022. Ketercapaian target indikator ini dipengaruhi oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU

Kepala Bakesbangpol sehingga berhasil mencapai target. adanya pembinaan ormas/LSM terkait kepengurusan SKT sehingga ormas/LSM mengetahui syarat-syarat apa saja yang perlu disiapkan untuk mengurus SKT. Selain itu terdapat aplikasi siOLA yang dapat mengakomodir pendaftaran SKT secara online. Untuk realisasi persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan tahun 2021 sebesar 49% dengan target 20%, sehingga capaiannya sebesar 245%. Sedangkan tahun 2022 realisasinya 72,72% sehingga capaiannya 363,63% dengan target yang sama. Dapat disimpulkan indikator persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan mengalami kenaikan di tahun 2022. Ketercapaian target indikator ini dipengaruhi oleh kinerja Bakesbangpol Kota Pasuruan yang fokus untuk mewujudkan kota Pasuruan yang stabil dengan angka potensi konflik yang rendah. Setiap potensi konflik yang muncul segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Untuk indikator Persentase pemilih dalam Pemilu tidak ada realisasi karena tahun 2022 tidak dilaksanakan Pemilu.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	8,75%	3%	291,66%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	72,72%	20%	363,63%
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	0	0	0

Sumber : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Periode 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.4 di atas diketahui bahwa indikator persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 291,66% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra. Sedangkan indikator persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 363,63%. Untuk indikator Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu tidak bisa dilihat tingkat kemajuan di tahun 2022, karena tidak ada pelaksanaan Pemilu.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar Provinsi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Provinsi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	8,75%	15%	58,33
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	72,72%	74%	98,27%

Sumber : LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	8,75%	291,66%	1. Adanya kegiatan pembinaan/pemberdayaan Ormas/LSM 2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU Kepala Bakesbangpol	
2	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	72,72%	363,63%	1. Adanya pelaporan dan survei lapangan terkait kejadian berlatarbelakang sospol 2. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU Kepala Bakesbangpol	

Sumber : IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022



Gambar 3.1 Rapat Evaluasi Kinerja

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Tar get	Realisa si	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capai an	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifit as Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	8,75%	291,66%	3.245.364.030	2.995.035.709	92,28%	199,38%
2	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifit as Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	72,72%	363,63%	942.559.130	810.708.720	86,01%	277,62%
3	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifit as Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	0	0	0	913.280.330	879.503.330	96,30%	

Sumber : IKU dan DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Berdasarkan table 3.7 di atas pada indikator persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif dan persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan masing-masing memiliki tingkat efisiensi 199,38% dan 277,62%.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	291,66%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Ormas/LSM yang ber- SKT	49,5	Menunjang	Semakin meningkatnya Ormas/LSm yang ber-SKT, akan meningkat pula jumlah ormas yang aktif
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ormas/LSM yang dibina	53,3	Menunjang	Semakin meningkatnya Ormas/LSm yang dibina, akan meningkat pula jumlah ormas yang aktif
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif	110	Menunjang	Semakin meningkatnya lembaga ekososbud yang aktif, akan mempengaruhi pula jumlah ormas/LSM yang aktif
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif	103,53	Menunjang	Semakin meningkatnya tokoh agama anggota forum keagamaan yang aktif, akan mempengaruhi pula jumlah ormas/LSM yang aktif
2	Meningkat nya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	363,63%	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	144	Menunjang	Pembinaan ideologi akan membentuk pola pikir masyarakat berpedoman pada ideologi Pancasila, sehingga masyarakat akan lebih bermoral dan menurunkan konflik di Kota Pasuruan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan penanganan konflik	909,00	Menunjang	Peningkatan penanganan konflik akan mempercepat penyelesaian konflik yang ada, sehingga berdampak pada jumlah konflik yang terjadi
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang dimediasi	125,92	Menunjang	Semakin sedikit konflik yang dimediasi,, menunjukkan bahwa Kota Pasuruan semakin stabil dan kondusif
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan penanganan konflik	909,00	Menunjang	Peningkatan penanganan konflik akan mempercepat penyelesaian konflik yang ada, sehingga berdampak pada jumlah konflik yang terjadi
3	Meningkatnya ketahanan dan Kondusifitas Wilayah	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan Pendidikan politik	143,85	Menunjang	Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik, semakin sukses pula pelaksanaan Pemilu
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu	0	-	-

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				

Sumber : Data Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Berdasarkan table 3.8 di atas seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjang IKU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	450069500	417010699	92,65
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	450069500	417010699	92,65
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	913280330	879503330	96,30
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	913280330	879503330	96,30

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	388485540	314173740	80,87
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	388485540	314173740	80,87
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	554073590	496534980	89,62
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	554073590	496534980	89,62
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2795294530	2578025010	92,23
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2795294530	2578025010	92,23
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4072876901	3865325140	94,90
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65795650	50791260	77,20
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3034965183	2925444360	96,39
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	53226408	47781168	89,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54783700	49652300	90,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201423807	200614250	99,60
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81874700	70417800	86,01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282583258	241279703	85,38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298224195	279344299	93,67

Sumber : Data Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pasuruan Tahun 2022

Dari tabel 3.9 di atas rata-rata capaian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 93,20%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 nilai 93,20% termasuk kategori capaian sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan sesuai dengan PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan, persentase capain setiap indikator yaitu : 1) Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif realisasinya 8,75% sehingga capainnya 291,66% dengan target 3%. 2) Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan realisasinya 72,72% sehingga capaiannya 363,63% dengan target 20%. 3) Persentase pemilih dalam Pemilu tidak ada realisasi karena tahun 2022 tidak dilaksanakan Pemilu.

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan tahun 2022 berhasil dalam merealisasikan kinerja dan anggaran yang telah direncanakan pada Rencana Strategi tahun 2021 dan Rencana Kerja tahun 2022.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : Walikota Pasuruan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

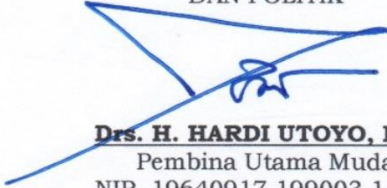
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, September 2022

Pihak kedua,
WALIKOTA PASURUAN


Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pihak pertama,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON II**

NAMA : Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
NIP : 19640917 199003 1 013
PANGKAT / GOL. : PEMBINA UTAMA MUDA / IV c
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JABATAN/KELAS JAB. : Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketahanan dan Kondusifitas Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	3%	3%
		Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	-	-
		Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	20%	20%

No	Program	Anggaran	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 433,565,540	Rp. 388,485,540
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 510,023,590	Rp 554,073,590
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 703,687,170	Rp 913,280,330
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 56,500,620	Rp 450,069,500
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,465,615,940	Rp 2,795,294,530
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,796,716,166	Rp 4,072,876,901
Jumlah Anggaran		Rp 7,966,109,026	Rp 9,174,080,391

Pihak kedua,
WALIKOTA PASURUAN

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, September 2022
Pihak pertama,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON II**

NAMA : Drs. HARDI UTOYO, M.Si
 NIP : 19640917 199003 1 013
 PANGKAT/GOL. : Pembina Utama Muda / IV c
 JABATAN : Plt. KEPALA BADAN
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT/OUTCOME												JUMLAH		%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase peningkatan jumlah orkemas yang aktif	Persentase (3)	TARG ET 1.5	TARG ET 1.5	TARG ET 1.5	TARG ET 2	TARG ET 1.5	TARG ET 1.5	TARG ET 2	TARG ET 1.5	TARG ET 1.5	TARG ET 2	TARG ET 1.5	TARG ET 2	REALISASI 3	REALISASI 3	
	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	Persentase (-)															0
	Persentase penurunan konflik di Kota Pasuruan	Persentase (20)	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	2			20
CAPAIAN OUTPUT			1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	2			23
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100

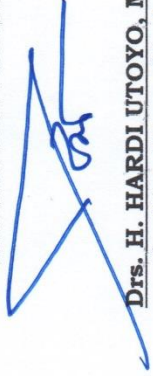
No.	PROGRAM	ANGGARAN		SUMBER
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 433,565,540	Rp. 388,485,540	APBD
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 510,023,590	Rp 554,073,590	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Rp 703,687,170	Rp 913,280,330	APBD
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 56,500,620	Rp 450,069,500	APBD
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,465,615,940	Rp 2,795,294,530	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,796,716,166	Rp 4,072,876,901	APBD
JUMLAH		Rp 7,966,109,026	Rp 9,174,080,391	

Pihak kedua,
WALIKOTA PASURUAN



Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, September 2022
Pihak pertama,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

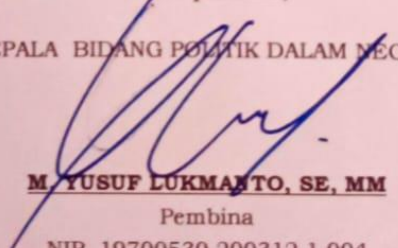
Pasuruan, Oktober 2022

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013


M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM

Pembina
NIP. 19700530 200312 1 004

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT ESELON III**

NAMA : M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM
 NIP : 19700530 200312 1 004
 PANGKAT / GOL. : PEMBINA /IV a
 JABATAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 TAHUN : 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam PEMILU	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	-%

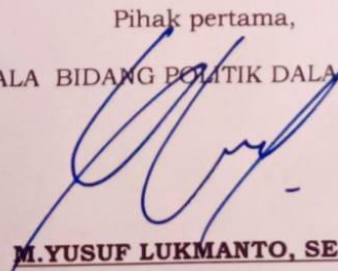
No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 703,687,170.00	Rp. 913,280,330.00
	Jumlah Anggaran	Rp 703,687,170.00	Rp. 913,280,330.00

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak kedua,
 Plt.BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640917 199003 1 013

Pihak pertama,
 KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM
 Pembina
 NIP. 19700530 200312 1 004

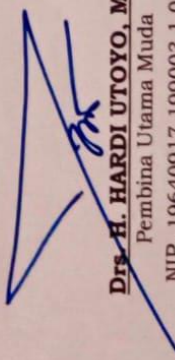
**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON III**

NAMA : M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM
NIP. : 19700530 200312 1 004
PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IV a
JABATAN/KELAS JABATAN : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK KOTA PASURUAN
TAHUN : 2022

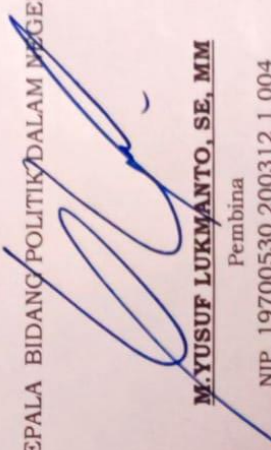
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT/OUTCOME												%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	TA RE SI	
1	Prosentase Partisipasi Pemilih Pemula dalam PEMILU	Persentase (-)													0
CAPAIAN OUTPUT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN															

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rp. 703,687,170	Rp. 913,280,330	APBD
Jumlah		Rp. 703,687,170	Rp. 913,280,330	

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Pasuruan, Oktober 2022
Pihak pertama,

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

M. YUSUF LUKMANTO, SE, MM
Pembina
NIP. 19700530 200312 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWATI, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN
NASIONAL


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013



PURWATI, S.E

Penata Tingkat I
NIP. 19650816 198603 2 021

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON III**

NAMA : PURWATI, S.E
NIP : 19650816 198603 2 021
PANGKAT / GOL. : Penata Tingkat I / III d
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JABATAN : KEPALA BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KEWASPADAAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penanganan potensi konflik di Kota Pasuruan	Persentase Peningkatan Penanganan Potensi Konflik	3%

No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 56,500,620.00	Rp 450,069,500.00
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,465,615,940.00	Rp 2,795,294,530.00
Jumlah Anggaran		Rp. 2.522.116.560.00	Rp 3.245.364.030.00

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Pasuruan, Oktober 2022
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG IDIOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL


PURWATI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19650816 198603 2 021

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON III**

NAMA : PURWATI, S.E
NIP : 19650816 198603 2 021
PANGKAT/GOLO : Penata Tingkat I / III d
JABATAN/KELOKAS JABATAN : Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KEWASPADAAN NASIONAL
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK KOTA PASURUAN
TAHUN : 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT/OUTCOME												%	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		JUMLAH
			TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI	TAR GET	REALI SASI
1	Prosentase Penting Penanganan Potensi Konflik	Persentase (%)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3
CAPAIAN OUTPUT			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																

No	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 56,500,620.00	Rp. 450,069,500.00	APBD
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,465,615,940.00	Rp 2,795,294,530.00	APBD
Jumlah		Rp. 2.522.116.560.00	Rp. 3.245.364.030.00	

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Pasuruan, Oktober 2022
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN
NASIONAL



PURWATI, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19650816 198603 2 021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIYONO, S.H
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa dan Kemasyarakatan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK


Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN
KEMASYARAKATAN


BUDIYONO, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19670728 198910 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON III**

NAMA : BUDIYONO, S.H
NIP : 19670728 198910 1 001
PANGKAT / GOL. : Penata Tingkat I/ III d
JABATAN : KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN KEMASYARAKATAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengetahuan berorganisasi	Prosentase Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibina	40%
2	Terbangunnya Harmonisasi antar umat beragama	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	85%

No	Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 433,565,540	Rp. 388,485,540.00
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 510,023,590	Rp 554,073,590.00
Jumlah Anggaran		Rp 943,589,130	Rp 942,559,130.00

Pasuruan, Oktober 2022

Pihak kedua,

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640917 199003 1 013

Pihak pertama,

KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA DAN
KEMASYARAKATAN

BUDIYONO, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19670728 198910 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
JABATAN ESELON III**

NAMA : BUDIYONO, S.H.
NIP : 19670728 198910 1 001
PANGKAT/GOL : PENATA TINGKAT I / III d
JABATAN/KELAS JABATAN : KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA & KEMASYARAKATAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK KOTA PASURUAN
TAHUN : 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT/OUTCOME												Jumlah		%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TAR GET	REALI SASI	
1	Prosentase Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuk	Persentas e (40)				5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40	
2	Prosentase Tokoh Agama Anggota Forum Keagamaan yang Aktif	Persentas e (85)	12	4	7	9	8	7	6	6	5	5	8	8	8	85	
CAPAIAN OUTPUT			12	4	7	14	12	11	10	10	9	10	13	13	12	5	
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																	

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 433,565,540	Rp. 388,485,540	APBD
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 510,023,590	Rp 554,073,590	APBD
Jumlah		Rp 943,589,130	Rp 942,559,130	

Pihak kedua,
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640917 199003 1 013

Pasuruan, Oktober 2022
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG KETAHANAN BANGSA
DAN KEMASYARAKATAN

BUDIYONO, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19670728 198910 1 001